



Implementasi Kebijakan Digitalisasi Arsip Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Karawang

Shafira Nur Sudrajat¹, Dadan Kurniansyah², Lina Aryani³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstract

Received: 11 April 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 22 Mei 2023

The rapid development of information technology in the digital era has a significant impact on archives. An organization's ability to adapt to electronic records management is essential to meet information needs. The Karawang Regency Library and Archives Office carries out the implementation of the archive digitization policy in accordance with PP Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE) to realize an integrated and comprehensive electronic-based government system to achieve a high-performing public service bureaucracy. However, the Karawang Regency Library and Archives Office has several obstacles that must be faced, namely lack of communication between employees. Lack of human resources both in terms of numbers and abilities and some supporting facilities, lack of adaptation to changes and others. The implementation of the archive digitization policy by the Karawang Regency Library and Archives Office is expected to realize an integrated and comprehensive electronic-based government system to achieve a high-performing public service bureaucracy to facilitate all integrated data collection processes. The purpose of this study was to determine and analyze policy implementation in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure at the Karawang Regency Library and Archives Office. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The theory used is the Edwards III model of policy implementation theory by considering four critical factors or variables in implementing public policies, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The results showed the achievement of the implementation of the archive digitization policy by the Karawang Regency Library and Archives Office in accordance with applicable regulations.

Keywords: Policy Implementation, Archive Digitalization, Karawang Regency Library and Archives Office

(*) Corresponding Author: shafirasudrajat2000@gmail.com

How to Cite: Sudrajat Shafira, Kurniansyah Dadan, & Aryani Lina. (2023). Implementasi Kebijakan Digitalisasi Arsip Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8079354>

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital memberikan dampak yang signifikan terhadap kearsipan. Pengelolaan arsip berbasis kertas yang dulu menjadi fokus segera digantikan dengan format elektronik yang jumlah dan penggunaannya semakin meningkat. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membahas kompleksitas peningkatan kualitas teknis secara khusus, serta tantangan, risiko, dan peluang secara umum dalam pengelolaan dokumen elektronik sehingga, dapat berkontribusi banyak bagi pengguna. Seiring dengan modernisasi, arsip elektronik semakin dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kecepatan berbagi, kemudahan akses, dan fleksibilitas dalam jaringan. Oleh karena itu, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan



manajemen arsip elektronik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi. Ada dua tujuan yang bisa dilakukan digitalisasi. Pertama, kemudahan akses untuk arsip dinamis, ketersediaan arsip untuk keterbukaan akses. Kedua, tujuan preservasi maka dari bentuk konvensional ke digital dan sebaliknya karena tujuannya menyimpan di beberapa media agar informasinya tidak hilang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang menjalankan implementasi kebijakan digitalisasi arsip sebagai salah satu bentuk penyelamatan arsip konvensional dengan mengkonversikan arsip dalam bentuk digital sesuai dengan PP Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dalam proses implementasi kebijakan digitalisasi arsip ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi yaitu, masih ada beberapa pegawai instansi yang masih belum memahami secara jelas dan akurat terkait dengan digitalisasi arsip. Sumber daya yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang memiliki kurang, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Selain itu, fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program digitalisasi arsip ini belum terpenuhi seperti kantor yang masih belum tertata dengan rapi, peralatan kantor yang kurang terawat sehingga, pada proses digitalisasi arsip seringkali muncul berbagai permasalahan mulai dari alat *scanner* yang macet hingga komputer yang *error* sehingga menghambat berjalannya proses digitalisasi arsip, dana yang belum mencukupi, karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Selain itu juga, kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Karawang yaitu masih perlunya dilakukan evaluasi terhadap beberapa aspek agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan baik dari aspek internal maupun dari eksternal organisasi maupun masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga selayaknya dapat ditingkatkan kuantitas serta kualitas proses digitalisasi arsip ini.

Munculnya kebijakan implementasi digitalisasi ini oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memfasilitasi penggunaan informasi untuk berbagai tujuan yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Akibatnya, semakin banyak organisasi membuat dan berbagi informasi, termasuk arsip dalam format elektronik. Selain itu, manajemen arsip elektronik memungkinkan organisasi memiliki opsi pemulihan bencana dengan mencadangkan data. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan dalam pengelolaan arsip fisik. Kearsipan elektronik sedang diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan di beberapa sektor terkait dan karena itu perlu dikelola dengan baik untuk menciptakan sistem administrasi publik yang lebih efisien dan transparan.

Model Edwards III (1980) menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan

sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang digitalisasi arsip adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang dikutip dalam (Kadji, 2016) implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor ini dalam implementasi digitalisasi arsip ini akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian proses digitalisasi arsip ini yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan digitalisasi arsip ini perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Agar implementasi digitalisasi ini dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggungjawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan.

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan digitalisasi arsip dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program digitalisasi arsip ini, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program digitalisasi arsip dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi program dan akuratnya komunikasi yang dikirim, apabila personil yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program mengalami kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya, maka sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

3. Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi

dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi digitalisasi arsip ini akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan dalam digitalisasi arsip ini yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan.

Implementasi Kebijakan digitalisasi arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang ditentukan oleh empat fase implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sktuktur birokrasi. Tulisan ini akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana pengelolaan arsip di era digital oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang melalui empat fase tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang bertujuan untuk menafsirkan berbagai gejala berdasarkan realitas yang dialami oleh subjek penelitian yang dalam hal ini adalah manusia, kemudian hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi kata-kata maupun kalimat secara alamiah dengan metode yang ada (Moleong, 2017). Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus terjun ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti memilih para informan yang bisa membagikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Digitalisasi Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu melalui Observasi (pengamatan), Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) antara lain Reduksi data, Penyajian data, serta Kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Digitalisasi Arsip

Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III dalam (Kadji, 2016) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dengan berlakunya PP Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan kebijakan tersebut, kejelasan tujuan digitalisasi arsip ini sudah dikomunikasikan dengan baik oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada seluruh instansi kearsipan di Indonesia termasuk di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang. Meskipun proses komunikasi yang ada belum mencapai komunikasi yang optimal, namun ANRI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berusaha terus konsisten demi terwujudnya pembaruan tersebut yakni digitalisasi arsip. Kebijakan digitalisasi arsip sudah diterima oleh semua pihak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang, namun masih ada beberapa pegawai instansi yang masih belum memahami secara jelas dan akurat terkait dengan digitalisasi arsip.

2. Sumberdaya

Komponen sumber daya terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang bisa dikatakan mengalami kekurangan sumberdaya. Dimulai dari kurangnya jumlah staf terutama dalam melaksanakan proses digitalisasi arsip. Kekurangan sumber daya manusia ini baik dari segi jumlah maupun kemampuan tentu berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan digitalisasi arsip. Kurangnya kemampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan digitalisasi arsip merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan skill yang memadai, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang pengoperasian komputer. Selain itu, Fasilitas yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program belum terpenuhi seperti kantor yang masih belum tertata dengan rapi, peralatan kantor yang kurang terawat sehingga pada proses digitalisasi arsip seringkali muncul berbagai permasalahan mulai dari alat *scanner* yang macet hingga komputer yang error sehingga bisa menghambat berjalannya proses digitalisasi arsip, serta dana yang mencukupi, karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Para staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang khususnya mereka yang berada di Bidang Kearsipan sudah setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan digitalisasi arsip, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Mereka memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sebagai tindak lanjut komitmen. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan secara konsisten dengan mempersiapkan sumber daya manusia maupun kelembagaan sehingga bisa melaksanakan program digitalisasi arsip. Namun program-program yang berkaitan dengan peningkatan keahlian dan mutu personal selalu dilakukan dan diikuti oleh hampir seluruh unsur pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan mengingat keahlian, baik yang bersifat substantif maupun manajerial.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan. Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan. Hal tersebut diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang telah mengupayakan Prosedur standar sedemikian rupa sehingga petunjuk pelaksanaan program-program dapat dilaksanakan tanpa prosedur yang berbelit dan disesuaikan dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana. Mengenai fragmentasi dapat dilihat dari jenisnya Prosedur Operasional Standar pada setiap program yang akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan Digitalisasi arsip. Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa aspek agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan. Masing masing pihak yang terkait mengetahui tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku. Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian terutama bagian Kearsipan, diharapkan akan dapat meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan koordinasi dengan institusi lain yang melaksanakan program-program yang berhubungan dengan program digitalisasi arsip. Dalam pelaksanaannya di akui

memang tidak semudah itu, masih ada kendala- kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun dari eksternal organisasi maupun masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga selayaknya dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dengan koordinasi yang efektif akan mempermudah pengelolaan kegiatan, pencarian sumber-sumber yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan harapan kebijakan.

HAMBATAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI ARSIP

A. Hambatan

1. Komunikasi

Hambatan yang ditemui pada poin komunikasi di Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten karawang yaitu proses komunikasi yang ada belum mencapai komunikasi yang optimal. Kebijakan digitalisasi arsip sudah diterima oleh semua pihak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang, namun masih ada beberapa pegawai instansi yang masih belum memahami secara jelas dan akurat terkait dengan digitalisasi arsip.

2. Sumber Daya

Hambatan yang ditemui pada poin sumberdaya di Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten karawang yaitu sumber daya yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang bisa dikatakan mengalami kekurangan sumber daya. Dimulai dari kurangnya jumlah staf terutama dalam melaksanakan proses digitalisasi arsip. Kekurangan sumber daya manusia ini baik dari segi jumlah maupun kemampuan tentu berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Kurangnya kemampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan digitalisasi arsip merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan skill yang memadai, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang pengoperasian komputer. Selain itu, Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program belum terpenuhi seperti kantor yang masih belum tertata dengan rapi, peralatan kantor yang kurang terawat sehingga pada proses digitalisasi arsip seringkali muncul berbagai permasalahan mulai dari alat scanner yang macet hingga komputer yang error sehingga bisa menghambat berjalannya proses digitalisasi arsip, serta dana yang mencukupi, karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Sikap (Disposisi)

Hambatan yang ditemui pada poin sikap (disposisi) di Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten karawang yaitu masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sebagai tindak lanjut komitmen dari para pegawai instansi. Masih

diperlukannya sumber daya manusia yang mempunyai skill dan kemampuan yang memadai sehingga bisa melaksanakan program digitalisasi arsip.

4. Struktur Birokrasi

Hambatan yang ditemui pada poin struktur birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang yaitu perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa aspek agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan. Masih ada kendala-kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun dari eksternal organisasi maupun masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga selanjutnya dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

5. Solusi

1. Komunikasi

Solusi terhadap hambatan yang ditemui pada poin komunikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang yaitu Pusat dan Daerah terus konsisten untuk melakukan pembaruan-pembaruan dan evaluasi demi terwujudnya implementasi kebijakan SPBE dan program digitalisasi arsip dapat terlaksana dengan baik. Selain itu bisa dengan mengadakan workshop maupun pelatihan-pelatihan tentang kearsipan dan digitalisasi arsip sehingga bisa menambah skill dan pengetahuan para pegawai instansi sehingga program digitalisasi arsip ini dapat terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya

Solusi terhadap hambatan yang ditemui pada poin sumberdaya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang yaitu melakukan perekrutan pegawai namun harus dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi demi peningkatan sumber daya manusia yang ada sehingga kualitas pekerjaan pun akan semakin meningkat. Apabila sumberdaya manusia sudah memadai, maka program digitalisasi arsip akan berjalan secara efektif dan mereka akan mampu untuk melakukan pengawasan dengan baik. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus segera dipenuhi seperti penataan Kembali ruang kantor, peralatan kantor yang harus dirawat secara berkala sehingga proses digitalisasi arsip akan berjalan lancar, serta dana yang mencukupi, karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Sikap (Disposisi)

Solusi terhadap hambatan yang ditemui pada poin sikap (disposisi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang yaitu pegawai harus berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Masih diperlukannya sumber daya manusia yang mempunyai skill dan kemampuan yang memadai dengan cara mengadakan workshop maupun pelatihan-pelatihan tentang kearsipan dan digitalisasi arsip sehingga bisa menambah skill dan pengetahuan para pegawai

instansi sehingga program digitalisasi arsip ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, bisa juga dengan melakukan perekrutan pegawai namun harus dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi demi peningkatan sumber daya manusia.

4. Struktur Birokrasi

Solusi terhadap hambatan yang ditemui pada poin struktur birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang yaitu pihak instansi melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan serta SOP yang sudah ada dan terlaksana dengan baik harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya. Harus ada koordinasi yang baik dari aspek internal maupun dari eksternal organisasi maupun masyarakat sehingga. Sumber daya Solusi terhadap hambatan yang ditemui pada poin sumberdaya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang yaitu melakukan perekrutan pegawai namun harus dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi demi peningkatan sumber daya manusia yang ada sehingga kualitas pekerjaan pun akan semakin meningkat. Apabila sumberdaya manusia sudah memadai, maka program digitalisasi arsip akan berjalan secara efektif dan mereka akan mampu untuk melakukan pengawasan dengan baik. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus segera dipenuhi seperti penataan Kembali ruang kantor, peralatan kantor yang harus dirawat secara berkala sehingga proses digitalisasi arsip akan berjalan lancar, serta dana yang mencukupi, karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. kualitas instansi dalam mewujudkan programnya dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya secara berkala sesuai dengan harapan kebijakan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dari pembahasan diatas berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi

Dengan berlakunya PP Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hambatan yang ditemui pada poin komunikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang yaitu proses komunikasi yang ada belum mencapai komunikasi yang optimal. Kebijakan digitalisasi arsip sudah diterima oleh semua pihak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang, namun masih ada beberapa pegawai instansi yang masih belum memahami secara jelas dan akurat terkait dengan digitalisasi arsip.

2. Sumberdaya

Sumberdaya yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang bisa dikatakan mengalami kekurangan sumberdaya. Dimulai dari kurangnya jumlah staf terutama dalam melaksanakan proses digitalisasi arsip. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan digitalisasi arsip. Selain itu, Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program belum terpenuhi seperti kantor yang masih belum tertata dengan rapi, peralatan kantor yang kurang terawat sehingga pada proses digitalisasi arsip seringkali muncul berbagai permasalahan mulai dari alat scanner yang macet hingga komputer yang error sehingga bisa menghambat berjalannya proses digitalisasi arsip, serta dana yang mencukupi, karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Solusi terhadap hambatan tersebut bisa dengan melakukan perekrutan pegawai dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi demi peningkatan sumber daya manusia yang ada sehingga kualitas pekerjaan pun akan semakin meningkat. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus segera dipenuhi seperti penataan Kembali ruang kantor, peralatan kantor yang harus dirawat secara berkala sehingga proses digitalisasi arsip akan berjalan lancar, serta dana yang mencukupi, karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Para staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang khususnya mereka yang berada di Bidang Kearsipan sudah setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan digitalisasi arsip, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan secara konsisten dengan mempersiapkan sumber daya manusia maupun kelembagaan sehingga bisa melaksanakan program digitalisasi arsip. Hambatan yang ditemui yaitu masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sebagai tindak lanjut komitmen dari para pegawai instansi. Masih diperlukannya sumber daya manusia yang mempunyai skill dan kemampuan yang memadai sehingga bisa melaksanakan program digitalisasi arsip.

4. Struktur Birokrasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang telah mengupayakan Prosedur standar sedemikian rupa sehingga petunjuk pelaksanaan program-program dapat dilaksanakan tanpa prosedur yang berbelit dan disesuaikan dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana. Mengenai fragmentasi dapat

dilihat dari jenisnya Prosedur Operasional Standar pada setiap program yang akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan Digitalisasi arsip. Hambatan yang ditemui yaitu perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa aspek agar dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan. Masih ada kendala- kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun dari eksternal organisasi maupun masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga selayaknya dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

REFERENSI

- Admin. (n.d.). Retrieved from National Archives:
<https://search.archives.gov/search?query=purpose+archive&submit=&utf8=&affiliate=national-archives>
- Admin. (n.d.). *Sejarah Arsip dan Dokumentasi Kab.Karawang*. Retrieved from Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Karawang:
<http://arsip.karawangkab.go.id/profil/sekilas>
- Kadji, Y. (2016). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Dalam Fakta dan Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Pusat, P. (2009). *Kearsipan*. Retrieved from JDIH BPK RI Database Peraturan:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009>
- Rosalin, S. (2017). *Manajemen Arsip Dinamis*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (I. Taufik, Ed.; Cetakan 36). PT. Remaja Rosdakarya.
- Putranto, Widiatmoko Adi.2017.Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna,1(1),2-3.